

## Plt Bupati Bogor Minta Kontraktor Tambah Jumlah Pekerja

CISARUA (IM)- Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan meminta PT Budi Jaya Utama selaku pemenang lelang proyek kelanjutan pembangunan Rest Area Puncak di Gunung Mas, Desa Tugu Selatan, Cisarua bekerja layaknya Sangkuriang.

Iwan Setiawan meminta kontraktor atau penyedia jasa, di waktu pekerjaan yang pendek tersebut, PT Budi Jaya Utama menambah jumlah pekerja dan menambah waktu kerja. "Pemegang lelang atau kontraktor proyek kelanjutan pembangunan Rest Area Puncak harus kerja layaknya Sangkuriang. Tambah jumlah pekerja, lalu kerja siang malam seperti Negara Saudi Arabia," pinta Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan kepada wartawan, Senin kemarin.

Politis Partai Gerindra ini menambahkan jika lalu pekerjaan pembangunan Rest Area Puncak tepat waktu, maka para pedagang kaki lima (PKL) Puncak akan direlokasi di awal Bulan Januari Tahun 2023. "Kalau sesuai rencana, sebelum Rest Area Puncak

diresmikan oleh saya, PKL Puncak direlokasi terlebih dahulu ke Rest Area Puncak," tambahnya.

Iwan sapaan akrabnya melanjutkan, ia tak ingin mendengar kontraktor proyek kelanjutan pembangunan Rest Area Puncak ber alasan cuaca atau musim hujan dalam keterlambatan pekerjaan. "Saya tak terima alasan karena musim atau cuaca hujan, sebelum mendaftarkan diri ikut lelang, harusnya mereka tau, kondisi Kabupaten Bogor yang kerap turun hujan di sore hari," lanjut Iwan.

Plt Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Bogor, Dedi menuturkan, agar proyek kelanjutan pembangunan Rest Area Puncak senilai Rp 7,5 miliar tersebut tepat waktu, setiap tiga hari sekali, ia melakukan monitor dan evaluasi (Monev) ke lokasi. "Proyek kelanjutan pembangunan Rest Area Puncak terus kami kebut, saya bahkan Monev ke lokasi setiap tiga hari. Hari ini, progres pekerjaan sudah berada di angka 25 persen," tutur Dedi. ● **gio**

## Disnakertrans Jabar Siapkan Langkah Mitigasi Cegah PHK Massal

BANDUNG (IM)- Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk mencegah perluasan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat, Taufik Garsadi, di Bandung, Selasa (15/11), mengatakan sejumlah langkah mitigasi tersebut yakni melakukan efisiensi, dengan cara mengurangi upah dan fasilitas pekerja level atas, misalnya tingkat manajer dan direktur.

Selain itu, tambah dia, mengurangi shift kerja, membatasi atau menghapuskan kerja lembur, serta mengurangi jam kerja dan mengurangi hari kerja bagi para pekerja. "Kemudian meliburkan atau merumahkan pekerja atau buruh secara bergilir untuk sementara waktu, tidak memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya, memberikan pensiun dini bagi yang sudah memenuhi persyaratan," kata dia.

Taufik mengatakan angka PHK di sektor padat karya di Jawa Barat terpantau tinggi seiring dengan temuan berbagai data perselisihan hubungan industrial di kabupaten kota, data laporan potensi atau rencana PHK dari 25 perusahaan binaan Better Work Indonesia (BWI)-ILO.

Selanjutnya, terdapat juga data laporan PHK dari anggota APINDO di 14 kabupaten/kota, serta BPJS Ketenagakerjaan dan berbagai laporan lainnya yang menunjukkan adanya PHK. Rinciannya data dari perselisihan hubungan industrial di kabupaten/kota sebanyak 4.155 orang, data BWI-ILO ada 47.539 orang,

kemudian data sementara AP-INDO 79.316 orang, serta data peserta non aktif BPJS Ketenagakerjaan 146.443 orang.

"Jadi data PHK yang tidak terlaporkan baik melalui dinas, Apindo, Serikat Pekerja, BWI maupun pekerja yang tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak mengklaim Jaminan Hari Tua atau JHT, jumlahnya bisa lebih besar lagi," katanya.

Taufik mengakui bahwa kondisi ini yang memicu data tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat menjadi tinggi dan melahirkan kasus PHK massal di industri padat karya. Berdasarkan penelusuran dan penelaahan Disnakertrans Jawa Barat, ia memastikan faktor penyebab kondisi PHK ini datang dari berbagai sebab eksternal dan internal.

Penyebab eksternal adalah pandemi COVID-19 selama dua tahun terakhir, lalu terjadinya perlambatan ekonomi dunia yang menyebabkan berkurangnya permintaan produk padat karya, serta konflik geopolitik di Ukraina. Dari sisi internal provinsi, kenaikan UMK di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat yang terlalu tinggi juga membuat kemampuan pengusaha di sektor padat karya untuk membayarkan kewajiban tidak semuanya merata.

Kemudian, menurut Taufik, terdapat juga alih daya teknologi dan perubahan metode kerja di sejumlah industri yang menurunkan kebutuhan pada sumber daya manusia. "Dari sisi internal perusahaan terjadi pula kesalahan pengelolaan bisnis dan peningkatan biaya produksi," katanya. ● **pra**



UNJUK RASA BURUH DI BANDUNG

Buruh dari berbagai elemen melakukan unjuk rasa di depan Kantor Disnakertrans Jabar, Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/11). Mereka menolak PHK massal di tengah isu resesi global dan meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar menaikkan upah pekerja tahun 2023 sebesar 13 persen.

## Program TPS-3R di KBB Tak Bisa Atasi Persoalan Sampah Secara Konkret

NGAMPRAH (IM)- Hadirnya Tempat Pengolahan Sampah - Reduce Reuse Recycle (TPS-3R) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) sempat digadang-gadang sebagai solusi pengentasan sampah. Kendati demikian, TPS-3R di KBB ternyata belum bisa memberikan solusi secara konkret untuk mengatasi persoalan sampah tersebut. Sebab, produk olahan sampah TPS-3R tak sepenuhnya bisa diserap pasar.

Berdasarkan catatan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) KBB, dari hasil olah sampah di 6 TPS-3R, termasuk 36 bank sampah di KBB, yang mudah diserap pasar masih sebatas hasil cacahan plastik dan magot. Sementara, untuk kompos dari olahan limbah organik belum bernilai ekonomis. "Dari hasil peninjauan yang kita lakukan ke sejumlah TPS-3R dan bank sampah di KBB, rata-rata masalahnya sama, olahan kompos belum diminati pasar," kata Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup, KBB, Apung Hadiat Purwoko saat dihubungi kemarin.

Saat ini, jelas dia, produk olahan sampah berupa cacahan plastik memang dibutuhkan untuk pabrik-pabrik daur ulang plastik. "Sedangkan magot diperlukan untuk pakan ikan," jelasnya. ● **pra**

Kendati demikian, berbeda dengan kedua produk olahan tersebut, produk olahan kompos dari sampah organik masih minat peminat lantaran para petani masih bergantung pada pupuk organik. "Permasalahan market yang susah, akhirnya TPS3R kurang produktif," terangnya.

Ia menilai, solusi konkret untuk permasalahan tersebut memang cukup kompleks. Pertama, pemerintah harus menyiapkan investor yang siap menanamkan kompos olahan sampah organik. "Di sini izin dan pendirian laboratorium harusnya diperudah," ujarnya.

Setelah itu, sambung dia, dibuat regulasi agar para petani di KBB beralih memakai kompos tersebut. "Mudah-mudahan ke depan ada solusi yang mau bermitra untuk menerima olahan kompos TPS-3R," ujarnya.

Ia mengakui, saat ini masih terkendala dari sisi perizinan dan uji laboratorium. Bahkan, pihaknya tidak punya keleluasaan untuk memasarkan produk olahan kompos dari TPS-3R. "Selama ini produk olahan hanya dipakai untuk media tanam saja. Kalau diolah jadi pupuk harus dikolaborasi dengan kotoran hewan," pungkasnya. ● **pra**

# 8 | Nusantara



REVITALISASI SITU KABANTENAN BOGOR

Dua pekerja melintas di sekitar Situ Kabantenan yang tengah direvitalisasi, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/11). Pemerintah Provinsi Jawa Barat merevitalisasi kawasan Situ Kabantenan untuk menjadi destinasi wisata multifungsi atau ekowisata guna mendorong jumlah kunjungan wisatawan.

## Angka Inflasi Kota Bogor Tertinggi Ketiga di Jawa Barat

Kenaikan tingkat Inflasi ini menjadi perhatian bersama Forkopimda Kota Bogor, dinas terkait termasuk BPS Kota Bogor. Pasalnya, berbagai langkah-langkah kebijakan dan arahan pengendalian inflasi dari pemerintah pusat sudah dilakukan Kota Bogor, kata Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah.

BOGOR (IM)- Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah membeberkan angka inflasi Kota Bogor bulan November 2022 ada di angka 5,96 persen atau naik 0,02 persen dari bulan Oktober 2022 yang angkanya di 5,94 persen.

Dengan angka inflasi 5,96 persen menempatkan Kota Bogor di posisi inflasi tertinggi ketiga di tingkat Jawa Barat

setelah Kota Tasikmalaya di angka 6,57 persen dan Kota Depok 6,24 persen.

"Tak hanya itu, angka inflasi Kota Bogor pun tercatat lebih tinggi dibanding inflasi Provinsi Jawa Barat dan nasional. Angka inflasi di Jabar 5,93 persen dan inflasi nasional 5,71 persen, jadi masih tinggi angka inflasi Kota Bogor," ungkap Syarifah kepada wartawan

pada Selasa (15/11).

Syarifah melanjutkan, kenaikan ini tentunya menjadi perhatian bersama Forkopimda Kota Bogor, dinas terkait termasuk BPS Kota Bogor. Pasalnya, berbagai langkah-langkah kebijakan dan arahan pengendalian inflasi dari pemerintah pusat sudah dilakukan Kota Bogor.

"Mulai dari kerja sama dengan daerah lain, operasi pasar murah, sidak ke pasar sampai pemberian BTT berupa voucher BBM kepada ojek online dan sopir angkot imbas dari kenaikan BBM," tuturnya.

"Penyumbang inflasi terbesar karena kenaikan BBM, kami sudah intervensi dengan bantuan voucher BBM dan masyarakat juga semakin banyak yang memilih naik Biskita yang tarifnya nol ru-

piah (gratis) sebagai alat transportasi," tambah Syarifah.

Syarifah mengakui, dua langkah yang telah dilakukan nyatanya masih belum bisa mengendalikan inflasi di Kota Bogor. Mengingat, di perhitungan statistik BPS dua hal ini tidak memberikan pengaruh signifikan. Pihaknya pun akan berkoordinasi dengan BPS apa saja yang menjadi variabel penting saat menghitung inflasi.

"Jadi variabel yang paling menentukan akan sama dengan apa yang kita lakukan di dalam kebijakan pengendalian inflasi. Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) pihaknya akan semakin intensif melakukan antisipasi dengan melakukan sidak ke pasar dan distributor untuk melihat apakah terjadi kenaikan yang jauh lebih dari harga eceran teringginya atau

tidak," bebernya.

Masih kata Syarifah, hal itu sesuai dengan arahan pemerintah pusat untuk mengecek harga di pasar dengan berpatokan pada Harga Eceran Tertinggi (HET). "Untuk pasokan di Kota Bogor tersedia, tidak ada barang langka. Kami berharap angka

inflasi bisa turun tapi paling tidak kita bisa mempertahankan dan tidak terjadi kenaikan," terangnya.

Syarifah juga mengatakan, kemarin juga dirinya mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang digelar secara virtual pada Senin (14/11). Rakor ini diikuti seluruh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tak terkecuali, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. ● **jay**

## Tren COVID-19 Kembali Naik, Disdik KBB Berikan Peringatan ke Seluruh Sekolah

NGAMPRAH (IM)- Tren kasus COVID-19 belakangan ini kembali mengalami kenaikan secara nasional. Hal itu dipicu munculnya tiga subvarian baru COVID-19, yakni varian BA.2.75, XBB, dan BQ1.

Berdasarkan data beberapa waktu lalu, Jawa Barat (Jabar) diketahui menjadi salah satu provinsi dengan penambahan kasus harian terbanyak setelah DKI Jakarta, yakni sebanyak

1.013 kasus baru.

Sehingga, hal tersebut harus menjadi perhatian berbagai kalangan agar tidak lagi ada lonjakan kasus COVID-19.

Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Asep Dendih mengatakan, pihaknya bakal tetap memperingatkan sekolah agar tetap menjalankan protokol kesehatan (prokes) secara ketat.

Menurutnya, hal itu sebagai antisipasi munculnya penyebaran virus di lingkungan sekolah.

"Sekolah tetap diminta menjalankan protokol kesehatan seperti yang sudah dijalankan selama ini," katanya kepada wartawan, kemarin.

"Kemudian, tidak boleh kendur atau lalai, apalagi sekarang tren kasusnya secara nasional mulai ada peningkatan lagi," sambungnya.

Ia menjelaskan, aturan penerapan prokes di lingkungan sekolah masih belum dicabut. Sehingga semua sekolah harus tetap menjalankan prokes sesuai yang ditetapkan pemerintah. "Seperti menyediakan tempat mencuci tangan, menyiapkan hand sanitizer, serta memakai masker," jelasnya.

Selain itu, sambung dia, physical distancing di sekolah juga harus tetap dijaga dan menghindari kerumunan.

Kemudian, jangan sampai guru maupun siswa lupa menerapkan prokes ketika melaksanakan kegiatan belajar mengajar, karena merasa bahwa kasus COVID-19 sudah melandai.

"Di ruangan sekolah siswa tetap harus memakai masker, kalau ada yang tidak menerapkan prokes, guru berhak untuk mengingatkan," tandasnya. ● **pra**

## Ketua KONI Kabupaten Bogor, Optimistis Pertahankan Kasta Juara

BOGOR (IM)- Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bogor bertekad akan mempertahankan kasta juara pada Porprov XIV Jabar.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum KONI Kabupaten Bogor, Junaedi Samsudin, menanggapi prestasi atlet yang bertarung di Porprov Jabar, yang nyaris meraih emas di setiap Cabang Olahraga (Cabor) Porprov Jabar 2022.

"Mohon doanya semoga kontingen Kabupaten Bogor bisa mempertahankan kasta juara," kata Junaedi Samsudin yang akrab disapa Junsam.

Disampaikan Junsam, segala upaya dan persiapan telah optimal dilakukan kontingen Kabupaten Bogor.

Junsam terus memantau dan zoom meeting dengan

ketua cabor serta para pelatih dan atlet agar mereka bertanding secara maksimal, dengan hasil akhir meraih medali emas.

"Kami bersama ketua kontingen dan Kadispora Kabupaten Bogor dan para wakil ketua kontingen semua wilayah terus memberikan support dan motivasi bagi para atlet Kabupaten Bogor, demi target per-kasta," tegas Junsam, kepada wartawan, Selasa (15/11).

Junsam berharap, semoga dengan kehadiran Plt Bupati Bogor akan menambah semangat dan motivasi pejuang atlet berlaga di Porprov Jabar meraih medali emas.

Lebih-lebih Plt Bupati Bogor mengobarkan semangat agar semua atlet, pelatih dan ketua cabor all out mengejar target per-kasta kasta juara.

Junsam minta doa dan dukungan semua masyarakat

Kabupaten Bogor agar semua atlet dan official Kontingen Kabupaten Bogor diberikan kesehatan, kelancaran dan kemudahan dalam meraih medali emas di Porprov Jabar 2022.

Berdasarkan pengamatan Junsam, sejauh ini pencapaian medali para atlet Kabupaten Bogor sampai hari ini (Selasa (15/11)) menunjukkan tren positif.

"Karena itu kami meminta kekompakan, semangat, dan sinergitas di tengah-tengah laga Porprov Jabar 2022 dan akan menjadi modal utama dalam melecutkan motivasi atlet semua cabor meraih medali emas di Porprov Jabar 2022," tukas Junsam.

Pada kesempatan ini, Junsam menjanjikan reward kepada para ketua cabor yang bisa melebihi target medali yang dicanangkan. ● **gio**



Ketua Umum KONI Kabupaten Bogor, Junaedi Samsudin (Junsam) dan atlet.

## RESE KE WILAYAH CIJERUK DAN GOMBONG Anggota DPRD Serap Aspirasi Warga dan Janji Diperjuangkan



Reses DPRD Kabupaten Bogor ke Cijeruk dan Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor.

BOGOR (IM)- Hasil reses DPRD Kabupaten ke wilayah Cijeruk dan Cogombong, Kabupaten Bogor berjanji akan perjuangkan aspirasi warga. Hal ini menanggapi keinginan warga agar dilakukan perubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) terutama wilayah Cigombong.

Di wilayah tersebut terjadi kelambatan pembangunan, seiring dengan pesatnya perkembangan penduduk di wilayah pemekaran dari Cijeruk.

Berbagai aspirasi disampaikan oleh hadirin yang terdiri dari para kepala desa (Kades), Kapolsek, Dan Ramil, kepala sekolah kepala UPT, perwakilan OKP, Partai Politik, serta unsur masyarakat lainnya.

Salah satu aspirasi penting yang disampaikan oleh Kades Tugu Jaya, M. Rifky Abdillah terkait perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) khususnya di wilayah

Kecamatan Cigombong, untuk menyeimbangkan pesatnya perkembangan pembangunan di wilayah Sukabumi.

"Kami mohon kepada anggota DPRD untuk mendorong direalisasinya perubahan RTRW," ujar Rifky.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan warga, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Tuti Alawiyah mengakui miris atas lambatnya perkembangan pembangunan di wilayah Kecamatan Cigombong itu.

"Jujur saja saya sangat miris melihat kantor kecamatan Cigombong yang sudah bertahun-tahun kondisinya sangat memprihatinkan," tutur Tuti Alawiyah.

Padahal aspirasi itu sudah tersampaikan dalam beberapa kali reses. Untuk apa hanya dicatat, tapi harus langsung ada tindakan. "Kami akan perjuangkan," tegasnya. ● **gio**